

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, perkembangan teknologi sudah maju sehingga dapat mempermudah dan memperlancar segala bentuk kegiatan organisasi. Hampir di semua kegiatan menggunakan teknologi modern, tidak terkecuali sistem informasi yang semakin pesat perkembangannya. Sistem informasi merupakan semua hal yang diterapkan dalam bidang komputerisasi yang memiliki pengelolaan data. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan informasi, bagi penggunaannya, termasuk masyarakat dan organisasi.

Pemerintah berupaya dalam menambah sarana untuk menyampaikan informasi secara nyata dan sempurna kepada masyarakat. Sistem informasi dapat digunakan oleh berbagai perusahaan pemerintah dan daerah, salah satunya BPKAD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat dengan BPKAD Provinsi Sumatera Barat yaitu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka BPKAD Sumbar menyusun rencana strategis untuk dapat menentukan arah perkembangannya dalam meningkatkan kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. BPKAD Sumbar memiliki dua fungsi yaitu, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Pada kantor BPKAD mempunyai beberapa aplikasi yang digunakan dalam memudahkan pekerjaan salah satunya ialah SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Aplikasi tersebut memiliki prosedur dan fungsi yang berguna untuk menunjang pekerjaan pegawai agar terlaksananya tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Ada beberapa alasan pentingnya penggunaan SIPD. Alasan pertama adalah aplikasi ini mudah digunakan. Penggunaan aplikasi SIPD ini pada kantor BPKAD digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan penganggaran serta dalam pentatausahaan. Pemakaian aplikasi ini mempermudah dalam penyampaian informasi dari pemerintah pusat dan daerah, dengan adanya aplikasi tersebut membantu pekerjaan pegawai di instansi dalam menginput data.

Sistem informasi berbentuk aplikasi lebih mudah dikembangkan dan lebih mudah untuk dioperasikan oleh pengguna. Sistem informasi berbasis aplikasi ini tidak hanya menampilkan informasi tetapi juga dapat digunakan untuk berdialog dengan data sehingga memberikan informasi untuk mengambil keputusan.

Sistem informasi telah menjadi kebutuhan bagi beberapa perusahaan maupun organisasi karena dianggap dapat mempermudah pekerjaan serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu sudah banyak bentuk sistem informasi yang digunakan diberbagai perusahaan sebagai bentuk perusahaan yang paham akan teknologi dan mampu berkembang seiring berjalannya zaman.

Alasan lain dalam penggunaan SIPD adalah transparansi. Seluruh data yang tercatat secara lengkap dan terkini diinformasikan kepada perangkat daerah secara transparan. Dimana semua data yang telah diinformasikan tidak ada yang ditutupi,

serta telah diawasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Informasi yang telah disampaikan ke pemerintah pusat, diinformasikan secara nyata dan akurat. Sehingga apabila terjadi kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam penginputan data, akan terlihat secara jelas.

Pemerintahan yang transparan atau terbuka merupakan suatu sistem yang dianut oleh pemerintah dalam menyelenggarakan aktivitasnya, dimana terdapat aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan dari masing-masing instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga mudah diakses oleh setiap lapisan masyarakat. Berbagai informasi yang diadakan, diberikan dan disediakan oleh pemerintah secara terakses dapat digunakan sebagai alat untuk memonitoring, mengevaluasi dan menilai pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dibawah pengawasan masyarakat.

Penyelegaraan pemerintah daerah setelah era reformasi ini dituntut untuk lebih bersikap transparan terhadap berbagai aktivitas tata kelola pemerintahan yang dibuat oleh pemerintah. Segala perangkat dan aturan sistem serta mekanisme kerja pemerintah harus transparan, dan dapat diinformasikan kepada masyarakat agar mudah dalam mengakses segala informasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pemerintah.

Transparansi pada prinsipnya adalah prinsip penciptaan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Melalui transparansi ini. Pemerintah dan masyarakat saling memberi informasi di

mana informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling berpartisipasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain mudah dan transparan, penggunaan SIPD ini sangatlah aman. Aplikasi SIPD telah melakukan uji keamanan informasi oleh BSSN dengan hasil tingkat kerentanan rendah pada tahun 2021 dan tidak ditemukannya celah keamanan. Aplikasi SIPD ini diawasi langsung oleh pemerintah pusat atau Kemendagri, jadi sudah dipastikan aplikasi SIPD ini teruji aman.

Keamanan sistem informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non peralatan komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meninjau serta membahas mengenai prosedur SIPD pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akan penulis bahas dalam laporan kerja praktek yang berjudul **“Penerapan SIPD (Sistem Informasi Penmerintahan Daerah) Pada Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Bagaimana penerapan SIPD pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pemakaian aplikasi SIPD pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?
3. Solusi apa saja yang digunakan dalam mengatasi kendala-kendala saat pemakaian aplikasi SIPD pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan SIPD pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemakaian aplikasi SIPD pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui solusi yang digunakan dalam mengatasi kendala-kendala saat pemakaian aplikasi SIPD pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Bagi akademis

Pelaksanaan magang ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan SIPD di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi instansi

Pelaksanaan magang ini dapat menambah bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Metode Penelitian

Penulis melakukan observasi atau magang langsung pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditempatkan di bagian Subbag Umum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Observasi

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terhadap pemakaian aplikasi SIPD pada Subbag Umum Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa staf yang dianggap bisa memberikan informasi ataupun data yang diperlukan.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data dari segala sumber seperti jurnal yang sudah diterbitkan, buku, pdf, website yang dirasa berhubungan dengan tugas akhir serta dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis telah melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jl Khatib Sulaiman No.43, Lolong Belanti, Kec Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal magang ini disusun berdasarkan lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari delapan sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penelitian, tempat dan waktu magang serta sistematika penulis

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menjalankan laporan magang ini.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bab ini menjelaskan profil perusahaan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi sejarah berdirinya BPKAD, visi misi serta struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan lebih lanjut Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil kegiatan magang pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



